

## MANFAAT DAN TANTANGAN PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Lisbet

### Abstrak

*Pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi Presiden G-20. Kesempatan berharga ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum G-20. Tulisan ini menganalisis manfaat dan tantangan Presidensi G-20 Indonesia 2022. Dalam Presidensi G-20, Indonesia mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger". Dengan menjadi Presiden G-20, Indonesia dapat membawa kepentingan nasional yang sejalan dengan kondisi global sebagai prioritas utama. Kepentingan nasional ini dapat diperjuangkan melalui Jalur Keuangan maupun Jalur Sherpa. Selain mendapatkan manfaat, Indonesia juga harus mengatasi banyak tantangan seperti menjalin kekompakan di antara negara anggota G-20, permasalahan arsitektur kesehatan global dan permasalahan utang negara miskin. Di samping itu, selama Presidensi G-20 Indonesia, akan ada ratusan kegiatan yang berlangsung. Agar seluruh kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka dukungan DPR RI sangat diperlukan. DPR RI dapat melaksanakan peran strategis dengan cara mendukung para mitra kerjanya di komisi-komisi DPR yang program kerjanya sejalan dengan peran yang dilakukan Indonesia sebagai Presiden G-20.*

### Pendahuluan

G-20 merupakan forum kerja sama internasional yang terdiri dari negara berkembang hingga negara maju di berbagai kawasan dunia. Negara anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. G-20 terbentuk pada tahun

1999 atas saran dari para menteri keuangan G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis).

G-20 mengendalikan 85% produk domestik bruto global dan para anggotanya merepresentasikan kurang lebih 60% dari total penduduk global. G-20 tidak memiliki kantor pusat atau kantor kesekretariatan yang permanen. Oleh karena itu, G-20 memiliki tuan rumah yang berganti setiap tahun. Tuan rumah



ditetapkan secara konsensus pada saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan didasarkan pada sistem rotasi kawasan. Tahun 2022, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah G-20. Presiden Joko Widodo memegang Presidensi G-20 sejak serah terima dari Presiden G-20 tahun 2021, yaitu Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada saat KTT G-20 tanggal 30-31 Oktober 2021 di kota Roma, Italia.

Presidensi G-20 Indonesia 2022 akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara miskin-berkembang. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada Upacara Pembukaan Presidensi G-20 Indonesia 2022 pada tanggal 1 Desember 2021 di Jakarta. Dalam berbagai forum kerja sama internasional, Indonesia memang sering kali dipercaya mewakili kepentingan negara miskin-berkembang.

Selain mewakili kepentingan negara miskin-berkembang, Indonesia juga diharapkan mampu mendorong kepentingan nasional pada forum G-20 dengan cara membingkai kepentingan nasional Indonesia dan berbagai negara ke dalam satu tantangan bersama untuk menemukan solusi bersama. Kepentingan nasional Indonesia seperti penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas demokrasi, serta terjaminnya keamanan dan pertahanan negara harus menjadi fokus utama Indonesia.

Walaupun G-20 memiliki kesan elit karena anggotanya kebanyakan merupakan negara maju, namun masyarakat banyak menaruh harapan agar Pemerintah menggendakan kepentingan negara

miskin-berkembang. Upaya pemerintah menggemakan Presidensi G-20 Indonesia 2022 kepada masyarakat bisa dikatakan berhasil. Baiknya sambutan masyarakat terhadap Presidensi G-20 Indonesia perlu dimanfaatkan sebagai modal untuk mendorong kepentingan nasional Indonesia di Forum G-20.

Di samping itu, lembaga-lembaga non-pemerintah yang tergabung dalam *engagement group* C-20 tengah membahas inisiatif yang akan direkomendasikan kepada negara-negara anggota kelompok G-20. Kelompok C-20 merupakan satu dari 10 *engagement group* yang berada di bawah jalur Sherpa Presidensi G-20 Indonesia. Keterlibatan C-20 dalam presidensi ini adalah bagian dari komitmen negara-negara anggota G-20 untuk berkonsultasi dengan komunitas pemangku kepentingan yang relevan.

Menurut Direktur Eksekutif *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID), sekaligus Pemimpin Kelompok C-20, Sugeng Bahagijo, rekomendasi yang disepakati pada forum G-20 nantinya harus spesifik, terukur dan konkret serta didukung oleh bukti. Dengan demikian, rekomendasi C-20 diharapkan dapat berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan global (Kompas, 18 Januari 2022). Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat dan tantangan Presidensi G-20 Indonesia Tahun 2022.

### Manfaat Presidensi G-20

G-20 bertujuan membahas kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional setelah dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara maju dan berkembang. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat,

berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Kendati demikian, pada tahun 2010, Sidang G-20 mulai membahas mengenai sektor pembangunan sehingga G-20 terdiri atas dua jalur, yakni Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Dengan menjadi Presiden G-20, Indonesia mendapatkan manfaat untuk mencapai kepentingan nasional melalui kedua jalur ini.

Jalur Keuangan mencakup kebijakan fiskal, moneter dan riil, regulasi keuangan, inklusi keuangan, investasi infrastruktur dan perpajakan internasional. Agenda prioritas pada jalur ini adalah: pertama, melakukan koordinasi *exit strategy* untuk mendukung pemulihan global; kedua, melakukan upaya penanganan dampak pandemi (*scanning effects*) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan; ketiga, melakukan penguatan sistem pembayaran di era digital; keempat, melakukan pengembangan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*); kelima, melakukan peningkatan sistem keuangan yang inklusif; dan keenam, membahas agenda perpajakan internasional.

Jalur Sherpa adalah jalur pembahasan dalam forum G-20 yang bidang-bidangnya lebih luas di luar isu keuangan. Nama "Sherpa" berasal dari istilah pemandu di Nepal. Hal ini menggambarkan bagaimana para Sherpa G-20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*). Pembahasan dalam jalur ini lebih luas, dalam dan terperinci. Pertemuan pada jalur ini dihadiri oleh para delegasi dari masing-masing negara anggota dalam tiga jenis pertemuan: pertemuan *working group*, *engagement group*, hingga pertemuan tingkat menteri. Jalur Sherpa mencakup perdagangan, investasi dan industri, ekonomi digital, antikorupsi, lapangan kerja, pertanian, pendidikan, urusan

luar negeri, budaya, kesehatan, pembangunan, lingkungan, energi berkelanjutan, perubahan iklim, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan.

Ada tiga prioritas utama Presidensi G-20 Indonesia. Ketiga prioritas tersebut, yakni pertama, penataan kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Isu utama yang akan dibahas adalah pendanaan, ketangguhan dan harmonisasi standar kesehatan global. Sasarannya, antara lain, meningkatkan produksi vaksin dengan distribusi yang lebih merata serta mempercepat mobilisasi investasi dan pendanaan yang dibutuhkan guna mencegah krisis selanjutnya. Untuk mencapai itu diperlukan restrukturisasi arsitektur kesehatan global.

Kedua, mengoptimalkan teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM. Isu utama yang akan dibahas adalah desain ulang tata kelola ekonomi global melalui teknologi digital. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus ditingkatkan serta keamanan data harus tetap dijaga. Untuk mencapainya, perlu menciptakan nilai ekonomi dengan teknologi digital.

Ketiga, membahas mengenai transisi energi yang berkelanjutan. Isu utama yang akan dibahas adalah sistem energi global yang lebih bersih dengan transisi terukur. Untuk itu, G-20 perlu mencapai persetujuan global untuk mempercepat transisi energi.

Selain itu, menurut *Co-Sherpa G-20 Indonesia* Dian Triansyah Djani, Indonesia memiliki kelebihan

sebagai *trusted chair* karena diplomasi Indonesia dikenal sebagai diplomasi yang suka mencari jalan keluar dan membentuk konsensus bersama untuk keluar dari permasalahan seperti yang telah dibuktikan pada saat Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB), ASEAN bahkan Dewan Keamanan (DK) PBB. Kelebihan ini yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk tidak saling menyalahkan tetapi mencari jalan keluar bersama (Kompas, 17 Januari 2022).

Di samping itu manfaat Presidensi G-20 Indonesia 2022 lainnya, antara lain: dapat mendorong terciptanya inklusi keuangan yang berfokus pada pengembangan kredit dan digitalisasi UMKM; dapat mencari jalan keluar bersama mengatasi dampak dari pandemi Covid-19; dapat menggalang dukungan untuk menarik investasi dari sektor swasta negara maju ke negara miskin-berkembang; dapat mendorong stimulasi atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan; dan kelima, dapat mendorong agenda terkait produksi dan distribusi vaksin di dunia.

### Tantangan Presidensi G-20

Tantangan utama Presidensi G-20 Indonesia adalah menjalin kekompakan pada saat situasi global saat ini yang sudah terseret polarisasi, tarik-menarik kepentingan serta konflik yang terjadi di antara negara-negara anggota G-20 seperti AS dengan China, AS dengan Rusia, China dengan India, serta China dengan Australia. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku

Faizasyah, tantangan Presidensi G-20 Indonesia adalah membangun rasa saling percaya di antara negara anggota G-20. Proses ini perlu terus dilakukan Indonesia melalui berbagai pendekatan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada pertemuan Sherpa bulan Desember 2021 (Kompas, 19 Januari 2022).

Melalui tema "*Recover Together, Recover Stronger*", Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia harus mencoba untuk berteman dengan seluruh negara anggota G-20, sehingga bisa menginspirasi munculnya kepentingan dan solusi bersama.

Tantangan lainnya adalah mengenai arsitektur kesehatan global. Indonesia perlu menggalang komitmen negara maju untuk membantu negara miskin-berkembang seperti pada persoalan pandemi Covid-19. Aspirasi negara miskin-berkembang untuk mampu mengakses vaksin secara struktural masih belum mendapat perhatian dari negara-negara maju. Sebagian besar distribusi vaksin masih mengandalkan metode karitatif yang kurang efektif mengendalikan penyebaran Covid-19, sehingga tingkat vaksinasi menjadi timpang.

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore, menilai bahwa ketidaksetaraan vaksin tidak hanya menghambat negara-negara termiskin, tetapi juga menahan dunia dari proses pemulihan (Kompas, 17 Januari 2022). Hal ini pun disadari oleh Koordinator Isu Kesehatan C-20 Agung Prakoso, yang juga merupakan *Program Officer* Isu Kesehatan pada *Indonesia for Global Justice*. Saat ini pihaknya sedang membuat tiga proposal yang akan diajukan kepada pemerintah untuk

menjadi isu prioritas bidang kesehatan: pertama, tentang peningkatan akses vaksin, obat (teurapetik) dan produk kesehatan terkait Covid-19 yang lebih berkeadilan; kedua, aksesibilitas layanan kesehatan khususnya untuk kelompok rentan dan berisiko tinggi; ketiga, dukungan pembiayaan kesehatan berkelanjutan. Selain itu, menurut Agung, masalah hak paten merupakan persoalan yang serius apabila hendak mengatasi permasalahan ketimpangan akses. Jika menghendaki proses pemulihan dari pandemi berjalan secara maksimal, maka penundaan hak paten vaksin bisa menjadi solusinya (Kompas, 17 Januari 2022).

Tantangan berikutnya adalah permasalahan utang negara miskin-berkembang. Menurut Presiden Bank Dunia, David Malpass, saat ini ekonomi dunia tengah menghadapi risiko gagal bayar. Pengetatan kebijakan moneter oleh negara-negara maju diyakini memiliki dampak. Saat ini, dibutuhkan pengurangan utang negara-negara miskin-berkembang yang berjumlah lebih dari US\$860 miliar. Jika menunggu lebih lama, maka akan terlambat mengatasi tantangan utang dari negara miskin-berkembang (Kompas, 17 Januari 2022).

### **Penutup**

Melalui Presidensi G-20 2022, Indonesia bertanggung jawab menjalankan politik bebas aktif sebagai amanat konstitusi sekaligus berkesempatan menunjukkan kepemimpinan, bukan hanya berperan sebagai tuan rumah. Dengan menjadi Presiden G-20, Indonesia dapat membawa kepentingan nasional yang sejalan dengan kondisi global sebagai prioritas utama. Kepentingan nasional ini dapat diperjuangkan melalui Jalur

Keuangan maupun Jalur Sherpa.

Dalam Presidensi G-20 Tahun 2022, Indonesia juga akan menghadapi tantangan seperti menjalin kekompakan di tengah situasi polarisasi serta konflik yang terjadi di antara sesama negara anggota. Tantangan lainnya adalah permasalahan arsitektur kesehatan global dan permasalahan utang negara miskin-berkembang. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat menyampaikan proposal konkret pada sidang-sidang tahun ini agar G-20 bisa bertindak kompak sebagai satu kesatuan.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mengawal dan memastikan Indonesia dapat menjalankan kepemimpinan sebagai Presiden G-20 dengan baik dan lancar. DPR RI dapat melaksanakan peran strategis melalui fungsi pengawasan dengan cara mendukung para mitra kerjanya di komisi-komisi terkait yang program kerjanya sejalan dengan peran yang dilakukan Indonesia sebagai Presiden G-20. Dalam hal ini, kementerian teknis maupun lembaga yang menjadi penanggung jawab kelompok kerja harus menyelenggarakan sendiri proses persidangan hingga membuat laporan jalannya persidangan.

### **Referensi**

- “Forum Ekonomi Dunia: G-20 Dorong Interaksi dengan Pelaku Ekonomi”, *Kompas*, 21 Januari 2022, hal. 4.
- “Forum G20 Jadi Tantangan Presidensi Indonesia,” 22 Desember 2021, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3539/forum-g20-jadi-tantangan-presidensi-indonesia>, diakses 23 Januari 2022.

"G20pedia", *kominfo.go.id*, <https://k-cloud.kominfo.go.id/s/g20pedia>, diakses 23 Januari 2022.

"G-20 Menjawab Masalah Global", *Media Indonesia*, 21 Januari 2022, hal. 2.

"Harapan Publik Pada Presidensi G-20", *Kompas*, 18 Januari 2022, hal. 1 dan 15.

"Indonesia Perlu Angkat Isu Pinggiran G-20", *Kompas*, 18 Januari 2022, hal. 1 dan 15.

"Indonesia Punya Modal Bawa G-20 Kompak", *Kompas*, 17 Januari 2022, hal. 1 dan 15.

"Memperkuat Modal Kelola Para Raksasa", *Kompas*, 19 Januari 2022, hal. 4.

"Pengalaman Diplomasi Berliku Mencari Vaksin", *Kompas*, 17 Januari 2022, hal. 1 dan 15.

"RI Bisa Sodorkan Narasi Alternatif", *Kompas*, 15 Januari 2022, hal.1 dan 15.

"Segudang Asa Pada Presidensi G-20", *Kompas*, 19 Januari 2022, hal. 6.



Lisbet  
*lisbet.sihombinga@dpr.go.id*

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017)

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.